PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET ARKEOLOGI PRASEJARAH DAN SEJARAH
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

TENTANG

PENELITIAN RELIEF CANDI PENATARAN SEBAGAI
REFLEKSI KIDUNG JAYENDRIYA

Nomor: 110/V/KS/04/2025
Nomor: 583A/UII.085/FA/HM.00/02/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Relief Candi Penataran sebagai Refleksi Kidung Jayendriya selanjutnya disebut "**Perjanjian**" ini dibuat pada hari Jumat, tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (25-04-2025), bertempat di Jakarta dan Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. M. Irfan Mahmud, S.S., M.Si.**, selaku Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5370/KP/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Pada Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra berkedudukan di Gedung Widya Graha Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Nomor 10, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

SIGN

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

II. **Dr. S. Ahmad Al Hamid, M.Pd.I.** selaku Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor SU-10B-085.UII/REK/OT.00/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Jawa Timur Masa Khidmah 2023 - 2027 berkedudukan di Gedung Fakultas Adab UII Dalwa Jalan Raya Raci Nomor 51, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat Riset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Arkeologi Prasejarah dan Sejarah berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik di Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah yang mempunyai tugas mencetak sarjana kebudayaan Islam yang berakhlak dan memiliki kemampuan akademik serta profesional berdasarkan nilai-nilai kelslaman dalam bidang kebudayaan, serta menyiapkan sarjana sejarah yang mumpuni di bidangnya; dan
3. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi terkait penelitian relief Candi Penataran sebagai Refleksi Kidung Jayendriya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, perlu dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah untuk melaksanakan kolaborasi riset dan inovasi dalam penelitian relief Candi Penataran sebagai refleksi Kidung Jayendriya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan penelitian relief Candi Penataran sebagai refleksi Kidung Jayendriya;
b. pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli untuk kegiatan dalam **Perjanjian** ini;
c. pemanfaatan data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perjanjian**;
d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK;**
e. pelaksanaan diseminasi hasil **Perjanjian**, meliputi kegiatan seminar, *workshop,* dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
f. publikasi pada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi/personel sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
      Luh Suwita Utami, S.S., M.Si. selaku Peneliti Ahli Muda, Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
   b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
      Rakai Hino Galeswangi, M.Pd. selaku Dosen pada Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

(2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati proposal penelitian atau bentuk lain yang disepakati.

(3) Proposal penelitian atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(4) Proposal penelitian atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau Keputusan Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.

(6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KORESPONDENSI

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**:
Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Gedung Widya Graha Lt. 7, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 10, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12710
Nama : Luh Suwita Utami, S.S., M.Si.
Jabatan : Peneliti Ahli Muda
Telepon : 081337286195
E-mail : luhs002@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:
Fakultas Adab Universias Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.
Jl. Raya Raci 51, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur Kode Pos 67153
Nama : Rakai Hino Galeswangi, M.Pd.
Jabatan : Dosen Fakultas Adab
Telepon : 081234515871
E-mail : rakaihino@iaidalwa.ac.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
   a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
   b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
   c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
   a. memperoleh rencana kegiatan penelitian yang disusun bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
   b. memperoleh dan mendayagunakan personel dan kepakaran **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan **Perjanjian**;
   c. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dalam Perjanjian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
   e. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi milik **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   f. memperoleh laporan hasil kegiatan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut
   a. menyusun rencana kegiatan penelitian bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
   b. melaksanakan kegiatan penelitian relief Candi Penataran sebagai

Dipindai dengan CamScanner

refleksi Kidung Jayendriya, yang meliputi identifikasi objek penelitian dan kajian epigrafi;

c. menyediakan personel periset dan/atau tenaga ahli yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan diseminasi hasil penelitian pelaksanaan **Perjanjian** bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
g. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian dalam Perjanjian ini yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi; dan
h. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan akhir hasil kegiatan penelitian **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
a. memperoleh rencana kegiatan penelitian yang disusun bersama dengan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
b. memperoleh dan mendayagunakan personel periset dan/atau tenaga ahli **PIHAK KESATU** yang terlibat dalam pelaksanaan **Perjanjian**;
c. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
e. mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dalam **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah dan diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi dan
f. memperoleh laporan hasil kegiatan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan penelitian bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
b. melaksanakan kegiatan penelitian relief Candi Penataran sebagai refleksi Kidung Jayendriya, yang meliputi kajian sejarah, identifikasi, dan analisis data penelitian;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

c. menyediakan personel dan kepakaran yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan diseminasi hasil penelitian pelaksanaan **Perjanjian** bersama dengan **PIHAK KESATU**;
g. bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian dalam **Perjanjian** ini dalam rangka publikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah; dan
h. menyusun laporan akhir hasil kegiatan penelitian dalam **Perjanjian** ini bersama **PIHAK KESATU.**

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
PENGAKHIRAN

(1) **Perjanjian** berakhir apabila:
   a. masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
   b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.

(3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.

(2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

(3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 13
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.

(2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

(3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PUBLIKASI

(1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.

(2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
   b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
   c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

(3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 15
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

(1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak

Dipindai dengan CamScanner

negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.

(2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 16
MANAJEMEN DATA

Data primer dan keluaran hasil riset, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.

Pasal 17
HASIL KERJA SAMA

(1) Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini berupa:
   a. data dan informasi;
   b. publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global bereputasi; dan
   c. laporan penelitian.

(2) Hasil kerja sama berdasarkan ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan fungsinya masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 18
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah	**Fakultas Adab**
Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra	**Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah**
Badan Riset dan Inovasi Nasional	**Dekan,**
Kepala,	
Dr. M. Irfan Mahmud, S.S., M.Si.	**Dr. S. Ahmad Al Hamid, M.Pd.I.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah tentang Penelitian Relief Candi Penataran Sebagai Refleksi Kidung Jayendriya

Paraf:

Ketua Tim Fungsi Hukum dan Kerja Sama Kawasan Jakarta II Fitria Meilina Fajri NIP. 198805242010122001	TT ELEKTRONIK
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tri Sundari NIP. 198002252003122001	TT ELEKTRONIK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Dipindai dengan CamScanner